

GERAKAN FEMINISME RADIKAL OPMT DALAM ISU KEKERASAN SEKSUAL DI TIMOR TIMUR TAHUN 1974-1999

Kristian Thomas Djara
kristiandjara@gmail.com

Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat

ABSTRACT

Sexual violence against women in East Timor during the conflict (1974-1999) analyzed using human security approach and transnational justice that failed to explain the power relations between men and women. The main objective of this research is to operationalize the concept of radical feminism in the mobility of OPMT (*Organização Popular de Mulheres Timorenses*). The method used is a qualitative method in case studies of sexual violence in East Timor during the conflict (1974-1999). The result of this research emphasized the inviolable power of patriarchy system, proved by the cases of sexual violence by the Indonesian military and the subordination of OPMT revolutionary movement under FALINTIL's superiority in resistance movement for East Timor's independence.

Key Words: *Sexual Violence, OPMT, East Timor, Radical Feminism*

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Timor Timur pada masa konflik (1974-1999) seringkali ditinjau menggunakan pendekatan *human security* dan *transnational justice* yang tidak mampu menjelaskan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengoperasionalkan konsep-konsep feminisme radikal dalam mobilitas OPMT (*Organização Popular de Mulheres Timorenses*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pada studi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Timor Timur pada masa konflik (1974-1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki semakin menguat di Timor Leste pada masa konflik yang terlihat melalui peningkatan kasus kekerasan seksual militer Indonesia dan gerakan revolusioner OPMT yang tersubordinasi di bawah superioritas FALINTIL dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, OPMT, Timor Timur, Feminisme Radikal*

I. PENDAHULUAN

Berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis konflik Timor Timur sangat berkarakteristik patriarki di mana isu kekerasan seksual pada perempuan termarginalisasi di bawah prioritas pembangunan infrastruktur dan perbaikan birokrasi negara baru. Konsep *human security* dan aplikasinya dikritik karena terlalu banyak mengadopsi fokus keamanan tradisional dan menggunakan logika keamanan nasional. (Tripp, et al, 2013, h. 11). Fiona Robinson mengkritik pendekatan *human security* sebagai pendekatan yang memiliki kebutaan gender karena cenderung mengabaikan dimensi gender di antara wacana *human security* yang sangat luas (Robinson, 2011, h. 52). Kritik feminisme juga mempertanyakan komitmen komisi *human security* yang hanya memasukkan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Konsep utama *human security* memperlihatkan cakupan isu yang sangat luas sehingga sangat sulit dijadikan pedoman pengambilan kebijakan dalam isu kekerasan seksual di Timor Timur pada masa konflik. Perdebatan yang berkembang adalah tidak ada kejelasan konseptual *human security* yang ketat karena banyaknya wacana keamanan HDR UNDP tahun 1994 yang menambah kebingungan akademis (Estrom, 2003, h. 28). Secara teoritis, konsep *human security* cukup kontroversial karena pendekatan tersebut mengutamakan individu sebagai fokus kebijakan keamanan. Namun, masih terdapat perdebatan internal tentang ancaman-ancaman terhadap individu dan cara tepat untuk melindungi individu dari ancaman tersebut (Newman, 2011, h. 1749). Debat *human security* masih mencakup ketidaksepakatan ruang lingkup konsep tersebut di antara para pendukung konsep *human security*.

Pendekatan *human security* cenderung fokus pada negara sebagai entitas yang mengatur kebijakan atas individu. Walaupun dalam konsep *human security*, individu adalah objek keamanan, tetapi negara tetaplah entitas yang bertanggungjawab menyediakan keamanan ideal bagi individu (Newman, 2011, h. 1749). Keamanan individu tidak selalu bertentangan dengan keamanan negara. Barry Buzan kemudian menawarkan konsep sekuritasasi isu non-militer dengan menegaskan negara adalah aktor utama yang menjamin keamanan individu (Baylis et al, 2014, h. 452). Namun demikian, penekanan berlebihan pada keamanan negara dapat mengabaikan kebutuhan perempuan atas rasa aman yang tidak dapat dijangkau dengan analisis makro paradigma keamanan tradisional.

Kekerasan terhadap perempuan di Timor Timur sebagai salah satu isu *human security* pada masa pendudukan Indonesia tidak dapat diselesaikan menggunakan perspektif transnational justice. *Transitional justice* mendorong adanya tanggapan hukum dan sosial dari praktik dan mekanisme kekerasan yang terjadi pada masa konflik, perselisihan sipil, dan periode represi yang ditujukan langsung dalam menghadapi dan menangani pelanggaran HAM dan hukum humaniter di masa lalu. (Stanley, 2009, h. 55). Proses negosiasi bagi keadilan transisional sangat berdimensi laki-laki di mana fokus utama adalah gencatan senjata melalui proses negosiasi dan pembagian wilayah (Bell & Catherine, 2007, h. 25). Hal-hal seperti masalah diskriminasi, peningkatan keamanan fisik, sosial dan hukum yang berkaitan dengan gender cenderung dianggap sekunder atau tidak

diperhatikan sama sekali. Situasi ini memicu semakin banyak kekerasan terhadap perempuan karena kurangnya pemantauan keputusan lokal oleh hukum nasional yang lazim terjadi pada negara transisional dengan pluralisme hukum seperti Timor Timur (Grenfell, 2006, h. 307).

Feminisme radikal menggarisbawahi keterkaitan antara kekerasan militer, ekonomi dan seksual. Namun, perbedaan mencolok feminisme dan *human security* adalah feminisme selalu memulai analisisnya dari individu dan masyarakat. Sedangkan *human security* cenderung memulai pembahasan dari negara dan sistem internasional yang masih menandakan negara sebagai aktor sentral (Mckay, 2004, h. 156). Perempuan Timor Timur seharusnya ditempatkan sebagai partner dialog atau aktor sentral karena perempuan mengerti cara penyelesaian masalah yang mengancam kehidupan perempuan itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa fokus tujuan, yakni pertama, menjelaskan kerangka teori feminisme radikal sebagai pendekatan yang tepat untuk menganalisis perjuangan perempuan dalam isu kekerasan seksual di Timor Timur pada masa konflik (1974-1999); Kedua, membahas kekerasan seksual terhadap perempuan Timor Timur pada masa konflik terutama bentuk dan dampak kekerasan tersebut; Ketiga, mengoperasikan konsep feminisme radikal dalam gerakan radikal OPMT (*Organizacao Popular de. Mulher* Timor) yang bertujuan menghancurkan dominasi patriarki militer Indonesia dan praktik komunitas lokal Timor Timur dengan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya, Perspektif feminisme digambarkan sebagai perspektif yang mewakili kelompok perempuan yang termarginalisasi dalam hierarki patriarki. Dalam ilmu Hubungan Internasional, feminisme merupakan salah satu teori kritis yang mempertanyakan peran negara karena adanya kelompok masyarakat yang tersudutkan dan menderita ketidakamanan kritis di negara berdaulat (Edwards & Carla, 2009, h. 11). Feminisme mengetengahkan konsep gender dalam melihat fenomena sosial dan politik dalam masyarakat. Gender pada dasarnya adalah sistem simbolis berdasarkan hirarki sosial yang mendikotomi karakter maskulin dan feminine dalam realitas sosial. Hierarki sosial berdasarkan gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk cara berpikir di tempat kita hidup dan cara memandang dunia (Scott, et al. 2018, h. 4). Oleh karena itu, peran gender sebagai lensa analisis feminisme sangat signifikan untuk melihat dan mengidentifikasi relasi kuasa yang terkristalisasi dalam tradisi patriarki berbagai ragam aspek kehidupan manusia.

Feminisme radikal pertama kali muncul di AS tahun 1960-an dalam arus gelombang feminisme kedua di mana perempuan mewakili kelas sosial yang tersubordinasi karena kurangnya mobilisasi untuk bersosialisasi. Feminisme radikal menitikberatkan pada pandangan kekerasan laki-laki terhadap perempuan sebagai sumber penindasan (Mackay, 2015, h. 61). Kekuasaan dalam sistem patriarki digunakan untuk dominasi dan mendegradasi perempuan melalui tindakan kekerasan termasuk pemerkosaan. Perspektif feminisme radikal melihat tindakan pemerkosaan lebih sebagai perilaku agresif untuk mengintimidasi dan menyebarkan ketakutan pada perempuan agar laki-laki tetap

memegang kontrol atas perempuan (Mcpail, 2015, h. 3). Negara dibentuk oleh laki-laki sehingga negara menjadi konflik kepentingan laki-laki itu sendiri.

Feminisme radikal merupakan salah pendekatan feminisme yang menekankan pada patriarki sebagai sebuah struktur. Feminisme radikal membantu menghidupkan aksi dan gerakan pembebasan perempuan yang luas dan memberikan dasar teori ketidaksetaraan gender dari tingkat mikro seperti kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan di tingkat makro seperti kekerasan perempuan pada masa perang dan konflik (Duriesmith & Sara, 2020, h. 13). Kerangka teori feminisme radikal menekankan tiga konsep penting yang saling berkaitan, yakni patriarki, *power*, dan penindasan. Patriarki membutuhkan kekuasaan yang menyebabkan represi pada perempuan untuk mempertahankan kendali laki-laki dalam sistem (Vukoicic, 2017, owh. 41). Perempuan sebagai kaum tertindas membuat kesimpulan dan memutuskan untuk mengubah sifat hubungan sosial dalam bentuk penindasan yang tertanam dalam sistem hierarki patriarki.

Kelompok feminisme radikal sudah terlibat dalam aktivisme melawan militerisme negara dan menghasilkan kritik yang menyebar secara luas tentang hubungan antara patriarki dan kekerasan negara sejak tahun 1971. Kelompok feminisme radikal mengkampanyekan penolakan praktik prostitusi pada masa perang dan membentuk advokasi internasional yang berpedoman pada hukum internasional selama beberapa decade (Duriesmith & Sara, 2020, h. 13). Gerakan RTN (*Reclaim The Night*) merupakan gerakan global perempuan turun ke jalan untuk memprotes segala bentuk kekerasan, kebrutalan, pemerintah yang patriarki setelah Konferensi beragendakan pengadilan internasional tentang kejahatan terhadap perempuan di Brussel, Belgia pada tahun 1976 (Mckay, 2015. h. 72). Sekitar 2000 perempuan dari 40 negara yang berbeda turun ke jalan dan menunjukkan penolakan terhadap semua bentuk kekerasan laki-laki.

Feminis radikal percaya bahwa perempuan dapat membebaskan diri mereka sendiri jika sistem patriarki yang menindas dan mendominasi dapat disingkirkan. Masyarakat dapat direformasi secara signifikan apabila otoritas berbasis laki-laki dan struktur kekuasaan yang bertanggung jawab atas penindasan dan ketidaksetaraan dapat berakhir. Rekonstruksi masyarakat adalah cara mencapai tujuan feminis radikal.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus (*case study*). Metode penelitian ini dapat dipahami sebagai penyelidikan fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas. Studi kasus dapat digunakan pada analisis tunggal (*single case*) maupun perbandingan sejumlah kasus kecil (*multiply-cases*). Namun, penelitian ini lebih terfokus untuk mendalami satu kasus untuk kemudian dianalisis, yakni kekerasan seksual di Timor Timur pada tahun 1974-1999. Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang diambil dari berbagai buku, jurnal dan dokumen *Chega Report* untuk melihat angka kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan oleh militer Indonesia.

Penulis menghubungkan tiga konsep dalam kerangka feminisme radikal, yakni patriarki, *power* dan penindasan dalam fenomena perjuangan OPMT untuk memerdekakan Timor Timur dan membebaskan perempuan dari belenggu kekerasan seksual dan praktik diskriminasi perempuan dalam komunitas lokal. Sistem patriarki dalam kesatuan militer Indonesia yang memiliki kekuasaan atas Timor Timur sebagai wilayah jajahan akan menyebabkan penindasan yang terimplementasikan dalam kekerasan seksual pada perempuan Timor Timur di masa konflik.

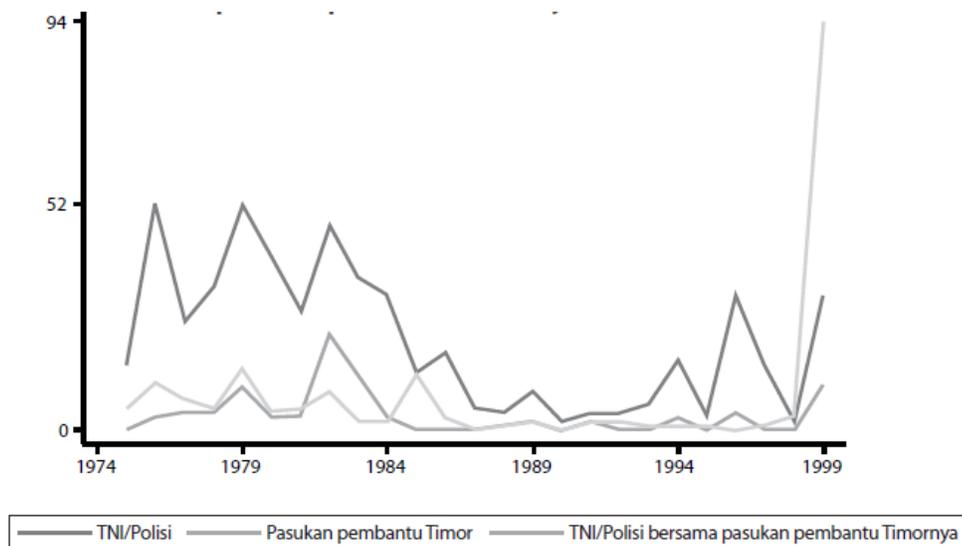
IV. PEMBAHASAN

Timor Timur sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara juga mengalami kasus kekerasan perempuan di masa lalu pada masa pendudukan Indonesia. Kekerasan seksual di Timor Timur diawali dengan invasi Indonesia atas Timor Timur tanggal 7 Desember 1975 melalui operasi Seroja (operasi teratai) (Janissa, 2019, h. 186). Konfrontasi senjata antara militer Indonesia dan gerilya FALINTIL (*Forças Armadas da Libertacao Nacional de Timor-Leste*) pro-kemerdekaan tahun 1977-1980 memiliki karakteristik pemerkosaan dan perbudakan seksual anggota OPMT sebagai divisi perempuan FALINTIL (Myrrtinen, 2005, h. 240). Walaupun diselingi pembantaian Kraras (1983) dan Santa Cruz (1991), isu kekerasan seksual perempuan Timor Timur kembali diperbincangkan paska terbentuknya NGO perempuan, seperti FOKUPERS (1996). Aksi milisi Timor Timur yang bersekutu dengan militer Indonesia dalam aksi menjelang referendum 1999 di distrik Covalima dan Suai mengandung aksi kekerasan seksual, penculikan dan pembunuhan warga sipil (Kent, 2019, h. 192). Isu kekerasan seksual tersebut akan dijabarkan pada bagian ini.

Data Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Timor Timur (1974-1999)

Kekerasan terhadap perempuan pada masa konflik di Timor Timur terfokus pada kekerasan seksual yang terbagi atas dua jenis, yakni pemerkosaan dan perbudakan seksual. Data CAVR (*Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Timur*) memperlihatkan beberapa pelaku dan jumlah korban kekerasan seksual sebagai berikut.

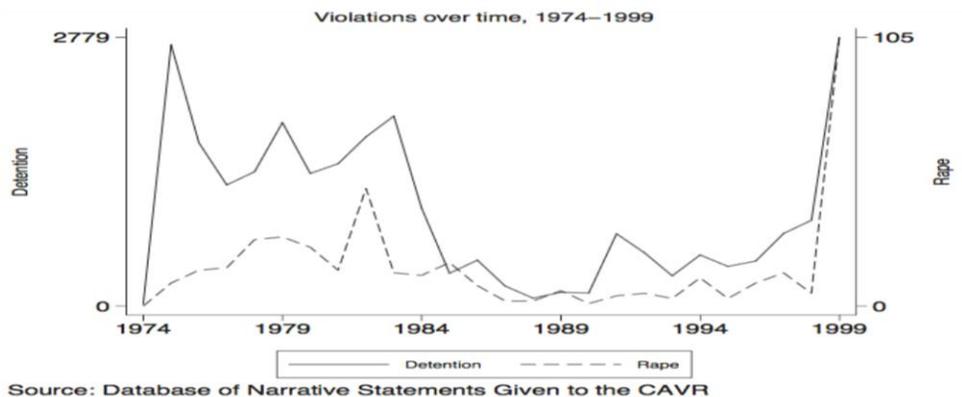
Grafik 1: Pelanggaran Berbasis Seksual yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi Dan Pasukan Pembantu Timor Tahun 1974-1999



Sumber: *Chega* Volume 1, Agustus 2010, h. 592

Berdasarkan grafik laporan di atas, 61 persen pelanggaran seksual dari tahun 1974-1999 dikaitkan dengan militer Indonesia. Pelanggaran seksual yang dilakukan TNI/ polisi sebanyak 22 persen. Sedangkan pelanggaran seksual yang dilakukan bersama-sama (TNI/Polisi/pasukan pembantu Timor) sebanyak 10,3 persen (Chega, 2010, h. 592). Kekerasan berbasis seksual ini sekali lagi adalah strategi militer Indonesia dalam melawan FALINTIL di samping strategi pengepungan, pembomban dan penghancuran aset pertanian dan ternak.

Grafik 2. Tindakan Pemerksaan Perempuan Tahun 1974-1999



Source: Database of Narrative Statements Given to the CAVR

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah kasus pemerksaan akan meningkat jika terjadi peningkatan jumlah perempuan tahanan militer yang lazimnya merupakan anggota pemberontak. Perempuan militan yang mengangkat senjata menghadapi militer Indonesia tersebut tergabung dalam OPMT sebagai sayap perjuangan perempuan di bawah garis komando FRETILIN (Niner, 2019, h.7). Sebagian anggota OPTM memutuskan tinggal di barak FRETILIN karena bahaya pemerksaan hingga pembunuhan selalu mengancam mereka ketika tinggal berdampingan dengan keluarga (Trindade, h. 45).

Grafik 3. Tindakan Perbudakan Seksual Tahun 1974-1999

Berdasarkan grafik tersebut, perbudakan seksual juga sangat meningkat selama periode operasi militer dan kembali menurun setelah operasi militer jarang dilakukan. CAVR melaporkan 64 persen kasus perbudakan seksual terjadi pada masa invasi dan periode operasi militer besar-besaran. Militer Indonesia juga memperbudak perempuan untuk kepuasan seksual dan bentuk ekspresi kekuasaan serta hak atas perempuan yang dijadikan property pada masa perang (Wood, 2014, h. 463). Inilah gambaran kebrutalan militer Indonesia dalam memperlakukan perempuan Timor Timur pada masa konflik.

Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Timor Timur (1974-1999)

Kekerasan seksual di Timor Timur terdiri dari dua bentuk, yakni pemerkosaan dan perbudakan seksual. Kekerasan seksual di Timor Timur mulai terjadi pada awal pendudukan Indonesia antara tahun 1975 hingga meningkat di tahun 1980-an. Banyak warga sipil ditangkap atau menyerah di bawah tekanan serangan militer setelah mereka turun dari gunung di mana mereka berlindung pada FALINTIL (*Forças Armadas da Libertacao Nacional de Timor-Leste*). Perempuan muda ditangkap dan dipindahkan ke pos militer yang berujung pada praktik perbudakan seksual. Sebagian perempuan langsung didatangi militer ke rumah mereka atau rumah keluarga sehingga tidak memungkinkan mereka menghindari dari perilaku pemerkosaan secara paksa oleh militer Indonesia (Kent, 2014, h. 297). Kekerasan seksual bergantung pada keputusan pemimpin militer Indonesia karena kekerasan seksual tidak hanya digunakan bagi pemenuhan kegiatan dan sarana rekreasi tetapi lebih berperan sebagai instrumen kontra pemberontakan (Harrington, 2011, h. 29).

Pemerkosaan pada masa konflik dapat terjadi dalam situasi yang tidak dapat ditolak. Perempuan diperkosa secara berkelompok selama serangan bersenjata. Perempuan menjadi korban pemerkosaan di pos militer sebagai cara interogasi. Pemerkosaan tersebut

merupakan pemerkosaan kolektif yang dilakukan kelompok militer Indoensia terhadap perempuan Timor Timur (Allden, 2004, h. 11). Korban pemerkosaan kolektif tidak dapat diperkirakan jumlahnya karena mengandalkan laporan korban serangan seksual. Korban takut dan malu untuk melaporkan kejadian tersebut karena otoritas lokal berada di bawah kontrol pemerintah Indoensia (Green, 2004, h. 105). Korban kekerasan seksual kolektif tersebut terkadang tidak ditemukan karena telah dibunuh militer Indonesia setelah diperkosa dalam kurun waktu tertentu di barak militer.

Perbudakan seksual yang seringkali terjadi, yakni perempuan dipanggil ke pos militer untuk tujuan seksual. Perempuan dipaksa menikah dengan anggota militer Indonesia. Namun, kemudian ditinggalkan ketika anggota militer kembali ke Indonesia dan menelantarkan perempuan Timor Timur (Allden, 2004, h. 11). Gambaran ini selaras dengan temuan CAVR berdasarkan wawancara komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Timor Timur. Perempuan dipaksa melakukan berbagai jenis hubungan seksual. Kasus yang seringkali terjadi adalah perempuan dijadikan properti di instansi militer (Kent, 2014, h. 298). Dalam beberapa kasus, keadaan tersebut berlangsung selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun.

Dampak Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Timor Timur (1974-1999)

Kekerasan seksual di Timor Timur menjadi topik perbincangan internasional kerana adanya pemberian nobel perdamaian kepada uskup Dili, Carlos Ximenes Belo dan Jose Ramos Horta tahun 1996. Dua tokoh ini mendapatkan penghargaan atas usahanya membela korban kekerasan dan penyiksaan terutama perempuan sebagai korban kekerasan seksual oleh militer Indonesia (Traub, 2000, h. 76). Gereja Katolik Roma Timor Timur yang dipimpin oleh Uskup Carlos Ximenes Belo berupaya melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak dapat menahan intoleransi masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual (Allden, 2004, h. 11). Sikap ini berakar dari penghormatan terhadap kehormatan dan keperawanan perempuan sehingga kehilangan hal tersebut akan menyebabkan adanya sitgmatisasi, marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat Timor Timur yang patriarki.

Konsekuensi kekerasan seksual bagi perempuan sebagai individu tidak hanya berdampak pada cedera fisik, melainkan juga membawa trauma psikologis dan sosial. Dampak psikologis tersebut dapat berupa kecemasan berlebihan, rasa malu, depresi, ketakutan akan seks dan kehilangan fungsi dalam masyarakat (Marsh et al, 2007, h. 137). Analisis feminisme menunjukkan bahwa dampak psikologis kekerasan seksual turut mempengaruhi komunitas. Dominasi maskulin dalam sistem patrirkarki komunitas Timor Timur mengetengahkan sikap menolak pengakuan atas kekerasan seksual yang menimpa perempuan Timor Timur. Mengakui kekerasan seksual militer Indonesia menyebabkan rasa malu kolektif sehingga mempengaruhi korban kekerasan seksual untuk bersuara pada media atau NGO lokal (George & Lia, 2017. h. 6). Hal ini mempersulit upaya membuka kasus kekerasan seksual yang masif terjadi di Timor Timur kepada dunia internasional.

Laporan CAVR, Chega telah membuka pontensi penelitian dari berbagai bidang ilmu tentang perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual di

Timor Timur menderita beberapa gangguan emosional, seperti *hanoin barak* atau depresi yang mengarah pada keadaan *bulak* atau gila, *moi* atau perasaan malu dan tidak pantas hidup di tengah masyarakat patriarki Timor Timur, dan menutup diri sebagai ekspresi traumatis karena diperkosa dan diperbudak dalam waktu yang sangat lama dalam pos militer Indonesia (Le Touze et al, 2005, h. 195). Perempuan korban kekerasan seksual memperoleh rasa sakit yang tidak dapat diungkapkan melalui bahasa manapun. Rasa sakit tersebut mengembalikan keadaan perempuan sebelum mengenal bahasa sehingga pengalaman kekerasan seksual direpresentasikan oleh tangisan korban yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat (Larke, 2009, h. 650). Pada akhirnya, kekerasan seksual perempuan Timor Timur membungkam informasi kebrutalan militer Indonesia

Gerakan Feminisme Radikal OPMT pada masa konflik (1974-1999)

FRETILIN (*Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente*) merupakan kelompok yang pertama menerapkan prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kebijakannya. Prinsip ini dipengaruhi oleh para perempuan muda yang berperan penting dalam komite sentra FRETILIN yang pernah belajar di Portugal awal tahun 1970-an (Hill, 2012, h. 217). Tiga perempuan radikal dan berpendidikan ini membentuk OPMT pada tahun 1975 di bawah naungan FRETILIN. Rosa Muki Bonaparte, salah satu perempuan pendiri OPMT, pada awal tahun 1970-an menyatakan bahwa pembentukan OPMT memiliki dua tujuan utama, yakni pertama, ikut berpartisipasi dalam perjuangan melawan kolonialisme. Kedua, melawan dalam segala hal diskriminasi kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat kolonial (Niner, 2011, h. 419).

OPMT adalah gerakan massa pertama perempuan Timor yang terbentuk 28 Agustus 1975 di bawah garis komando FRETILIN setelah perang saudara FRETILIN dan UDT. Pendiri OPMT berpandangan bahwa perjuangan melawan patriarki dapat membantu perjuangan FRETILIN melawan pengaruh kolonialisme (Trembath & Grenfell, 2007, h. 56). Banyak anggota OPMT mengalami pemerkosaan, kekerasan seksual lain dan pembunuhan oleh militer Indonesia. Invasi Indonesia tahun 1975 menghentikan upaya OPMT membawa kesetaraan gender dalam praktik tradisional adat Timor Timur dengan terbunuhnya tiga tokoh perempuan tersebut. Pada saat yang sama, pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang. (Myrrtinen, 2005, h. 240). Setelah invasi Indonesia, OPMT terfokus pada misi pembebasan perempuan Timor Timur dan bergabung dalam sayap bersenjata FRETILIN, yakni FALINTIL

OPMT adalah organisasi perempuan yang mengatur kegiatan perempuan. Organisasi ini mendorong perempuan berpartisipasi dalam literasi, diskusi ekonomi serta politik yang diselenggarakan agar perempuan memahami kesetaraan peran dalam masyarakat. Tujuan khusus OPMT adalah menghapuskan pandangan patriarki yang membebaskan perempuan sebagai tradisi masyarakat Timor Timur dan warisan kolonialisme Portugis (Capizi et al, 1976, h. 391). OPMT berada di garis depan perlawanan terhadap *indonesianisasi* Timor dengan melakukan sosialisasi dan pemeliharaan budaya lokal di komunitas untuk menghambat perubahan yang dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dalam masyarakat patriarki Timor Timur. Pada tahun 1996, Emily Franks mengakui peran perempuan yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur dengan

mempertaruhkan segala barang kepunyaan untuk menopang kehidupan FALINTIL bahkan menjadi target penyiksaan dan pemerkosaan (Nantes, 2009, h. 171). Pada faktanya, hierarki dalam kelompok perjuangan masih berlaku di Timor Timur sehingga perempuan tidak mendapat sorotan penting dalam membahas perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

Perempuan juga terlibat dalam mendukung gerakan FALINTIL dengan mengangkat senjata melawan militer Indonesia. OPTM mawadahi perempuan pejuang kemerdekaan yang memainkan peran sebagai utusan (*estefas*), membawa perbekalan pejuang, memasak dan membersihkan tempat tinggal para gerilyawan. Dalam tugasnya tersebut, perempuan OPMT tidak meninggalkan tujuan terbentuknya organisasi dengan mengkampanyekan hak-hak perempuan Timor Timur (Myrrtinen, 2005, h. 240). OPMT melawan militer Indonesia dengan dua cara utama, yakni, pertama menyokong kehidupan keluarga dan komunitas dengan menyediakan makanan dan layanan kesehatan. Kedua, menyediakan bantuan logistik bagi FALINTIL dan berpartisipasi dalam operasi pemberontakan FALINTIL sebagai militan bersenjata (Trindade, h. 45). Sebagian anggota OPTM memutuskan tinggal di kamp FRETILIN karena bahaya pemerkosaan dan kekerasan seksual hingga pembunuhan selalu mengancam mereka ketika tinggal berdampingan dengan keluarga.

OPMT membuktikan transformasi peran perempuan dari ranah rumah tangga menuju medan pertempuran. Adapun peran yang dimainkan dalam masyarakat tanpa kekerasan adalah mengkritik praktik poligami dan pemberlakuan mahar karena pada dasarnya OPTM bertujuan untuk membebaskan perempuan dari berbagai bentuk perilaku diskriminasi yang amoral. Perjuangan OPMT ditujukan untuk melawan penindasan internal oleh orang Timor Timur sendiri dan penindasan eksternal dari militer Indonesia (Mason, 2005, h. 742). Perempuan dengan keluarga yang memihak razim Indonesia juga berpotensi mengalami tindakan kekerasan seksual. Walaupun keluarga perempuan tersebut terlibat dalam HANSIP (Pertahanan Sipil) dan TBO (Tenaga Bantuan Operasi), namun kekerasan seksual yang berkelanjutan tetap menimpa mereka dengan dalil membuktikan kesetiaan kepada pemerintah Indonesia (Kent, 2014, h. 299).

Pada tahun 1980-an, perempuan memberikan dukungan berupa perawatan kesehatan, menyediakan makanan, dan uang bagi perlawanan bersenjata Gusmao telah mengubah strategi FALINTIL sejak 1981 hingga 1999, yakni mmeperbanyak taktik defensif daripada tindakan yang memicu kekerasan. Gerakan gerilya tetap berjalan, namun terlihat tidak menentang senjata (Whittington, 2003, h. 1283). Dampak kekalahan FALINTIL melawan militer Indonesia menyebabkan FALINTIL dan OPMT bersembunyi di pegunungan dan hutan. Perempuan Timor Timur pada periode 1981-1999 lebih memilih perjuangan tanpa kekerasan yang bertolakbelakang dengan cara OPMT yang mengeluarkan protes pragmatis dan militan pada periode awal pembentukannya (Mason, 2005, h. 743). Dengan demikian, OPMT mengambil peran pendukung gerakan FALINTIL hingga terbentuknya CNRT (*Conselho Nacional de Resistência Timorese*) yang mawadahi semua kelompok perjuangan kemerdekaan di Timor Timur.

CNRT didirikan di Portugal tahun 1998. OPMT yang diwakili oleh Maria Domingos Alves menyampaikan hak-hak perempuan sebagai bagian masalah politik tahun 1998 dan mengadakan rapat umum menentang kekerasn perempuan di Dili. Upaya

Internasional untuk memperjuangkan kebebasan perempuan dari kekerasan seksual diperkenalkan oleh Milena Pires pada konferensi CNRT di Melbourne pada April 1999. Dalam konferensi ini, Milena menyampaikan perlunya pembentukan unit gender pada pemerintahan transisi. Pada akhirnya, advokasi kesetaraan gender di Timor Timur disesuaikan dengan dasar Platform Beijing 1995. Langka internasional ini merupakan awal diadakannya Kongres Perempuan Pertama Timor Timur di Dili Juni 2000 (Jannisa, 2019, h. 397). Setelah kemerdekaan, OPMT memperjelas misinya di bidang emansipasi perempuan di semua aspek kehidupan dengan kesadaran bahwa sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender terus berlanjut setelah kemerdekaan (Trembath & Grenfell, 2007, h. 56). OPMT mendukung perwakilan politik perempuan dengan langkah membentuk kantor promosi kesetaraan dan inisiatif kebijakan pemerintah FRETILIN sebagai langkah maju yang signifikan

Perempuan Timor Timur terlibat aktif dalam perlawanan secara diplomatik. Front diplomatic tersebut dipimpin oleh Xanana Gusmao yang bertujuan membantun dukungan internasional untuk kemerdekaan Timor Timur. Anggota OPMT, aktivis dan mahasiswa terpelajar yang tinggal di kota meningkatkan jaringan solidaritas internasional dan jaringan perempuan untuk membangun kesadaran internasional akan pelanggaran HAM di Timor Timur. OMT (*Orgnizacao de Mulher Timor*) sebagai organisasi perempuan didirikan tahun 1998 untuk mempromosikan gerakan kemerdekaan Timor Timur yang bersatu. Sebagian anggota OPMT tergabung dalam OMT. Namun demikian, anggota OMT lebih beragam karena berangkat dari berbagai afiliasi politik di Timor Timur (Kent & Naomi, 2014, h. 478). Perempuan tetap tidak diakui dalam hirarki resistensi hingga tahun 1990-an. Gambaran ini adalah bentuk dimensi patriarki dalam masyarakat maskulin di mana peran perempuan dalam gerakan pemberontak tidak sepenuhnya diterima oleh laki-laki karena konstruksi pemikiran tradisional bahwa tempat perempuan adalah di rumah mengurus anak. Pada tahun 1998, pembentukan divisi perempuan CNRT ditolak anggota CNRT yang didominasi oleh laki-laki.

V. KESIMPULAN

Pendekatan feminisme radikal mampu menjelaskan relasi kuasa antara militer Indonesia dan perempuan korban kekerasan seksual di Timor Timur pada masa konflik. Feminisme radikal menghadirkan sebuah dimensi baru, yakni perempuan sebagai aktor sentral dalam perjuangan membebaskan kelompok perempuan yang tertindas dalam budaya patriarki pada masa konflik di Timor Timur. Gerakan feminisme radikal OPMT dalam perkembangannya tidak membawa perubahan signifikan sebagai gerakan revolusioner yang bertujuan mengubah sistem patriarki. Dominasi maskulin dalam kelompok pro-kemerdekaan dan praktik komunitas tradisional yang merugikan perempuan tetap berlaku untuk setiap perempuan Timor Timur. Penolakan komunitas atas perempuan korban kekerasan seksual pun semakin meningkat paska referendum walaupun wadah NGO lokal, seperti REDE FETO kemudian dapat meningkatkan jumlah perwakilan perempuan dalam parlemen Timor Leste. Secara teoritis, integrasi pendekatan *human security* dan feminisme dengan memberikan ruang pada dimensi gender dapat mempersempit dan terfokus pada perempuan ketika digunakan sebagai pedoman kebijakan

paska konflik. Dengan demikian, kepentingan perempuan juga terakomodasi melalui elaborasi dua penekatan tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allden, Susanne. (2004). Internalising The Culture of Human Rights: Securing Women's Rights in Post-Conflicts East Timor. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and The Law*. Vol 1. No. 8, 1-23.
- [2] Baylis, John, Steve Smith, and Patricia Owens. (2014). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Second Edition*. Oxford University Press.
- [3] Bell, C., & O'Rourke, C. (2007). Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory Essay. *International Journal of Transitional Justice*. Vol.1. No. 1, 23-44.
- [4] Capizzi, E., Hill, H., & Macey, D. (1976). FRETILIN and the struggle for independence in East Timor. *Race & Class*. Vol. 17, No. 4, 381-395
- [5] Chega Volume I (Agustus 2010). Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste.
- [6] Corcoran-Nantes, Y. (2009). The politics of culture and the culture of politics—a case study of gender and politics in Lospalos, Timor-Leste. *Conflict, Security & Development*. Vol. 9. No. 2, 165-187
- [7] Estrom, Bert. (2003). *Japan and The Challenge of Human security*. New York: Routledge
- [8] Edwards, Alice and Carla Festman. 2009. *Human security and Non-Citizens: Law, Policy and International Affairs*. Cambridge University Press.
- [9] Duriesmith, David. (2013). Is Manhood a Causal Factor in the Shifting Nature of War? *International Feminist Journal of Politics*. Vol. 16. No. 2, 236-254.
- [10] Duriesmith, David and Sara Merger. 2020. Returning to the Root: Radical Feminist Thought and Feminist Theories of International Relations. *Review of International Studies*. 1-19.
- [11] George, N., & Kent, L. (2017). Sexual violence and hybrid peacebuilding: how does silence “speak”? *Third World Thematics: A TWQ Journal*, Vol. 2. No. 4, 518-537.
- [12] Grenfell, Laura. (2006). Legal Pluralism and The Rule of Law in Timor Leste. *Leiden Journal of Interational Law*. Vol.19, 305-337
- [13] Harrington, C. (2011). *Governing sex workers in Timor Leste*. *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 52. No. 1, 29-41
- [14] Jannisa, Gudmun. 2019. *Timor Leste in The World BC to Independece*. Malae Production.
- [15] Kent, L. 2011. Local Memory Practices in East Timor: Disrupting Transitional Justice Narratives. *International Journal of Transitional Justice*. Vol. 5. No. 3, 434-455.
- [16] Kent, Lia. (2014). Narratives of Suffering and endurance: Coercive Sexual Relationships, Truth Commissions and Possibilities for gender Justice in Timor-Leste. *The International Journal of Transitional Justice*. Vol. 8. 289-313

- [17] Kent, L., & Kinsella, N. (2014). A Luta Kontinua (The Struggle Continues). *International Feminist Journal of Politics*. Vol. 17. No. 3, 473–494.
- [18] Kent, L. (2019). Transitional justice and the spaces of memory activism in Timor-Leste and Aceh. *Global Change, Peace & Security*. Vol. 31. No. 2, 181–199.
- [19] Larke, B. (2009). “. . . And the Truth Shall Set You Free”: Confessional Trade-Offs and Community Reconciliation in East Timor. *Asian Journal of Social Science*. Vol. 37. No. 4, 646–676
- [20] Le Touze, Dominique, Derrick Silove and Anthony Zwi. (2005). Can There Be Healing Without Justice? *Lesson from The Commission for Reception, Truth and Reconciliation On East Timor Intervention*. Vol. 3. No. 3, 192-202
- [21] Mackay, Finn. (2015). *Radical Feminism Activism in Movement*. New York: Palgrave
- [22] Mason, Christine. (2005). Women, Violence and Nonviolent Resistance in East Timor. *Journal of Peace Research*. Vol, 42, No. 6, 737-749
- [23] Mckay, Susan. 2004. Women, Human Security, and Peace-building: A Feminist Analysis. *IPSHU English Research Report Series, Conflict and Human Security*. No. 19.
- [24] Mcphail, Beverly. (2015). Feminist Framework Plus. ResearchGate Marsh, M., Purdin, S., & Navani, S. 2006. *Addressing sexual violence in humanitarian emergencies*. *Global Public Health*. Vol. 1, No. 2, 133–146
- [25] Myrntinen, Henri. (2005). Masculinities, Violence, and power in Timor Leste. *Lusotopie, Recherches politiques Internationales Sur Les Espaces Issus de l’histoire de la Colonisation Postugaises*. Vol. 12, No. 1, 233-244.
- [26] Newman, E. (2011). A Human Security Peace-Building Agenda. *Third World Quarterly*. Vol. 32. No. 10, 1737–1756
- [27] Niner, S. (2011). Hakat Klot Narrow Steps. *International Feminist Journal of Politics*. Vol. 13. No.3, 413–435.
- [28] Niner, S. L., & Loney, H. (2019). The Women’s Movement in Timor-Leste and Potential for Social Change. *Politics & Gende*. 1–29.
- [29] Robinson, Fiona. (2011). *A Feminist Approach to Human Security*. Philadelphia: Temple University Press
- [30] Scott, James, Ralph Carter & Cooper Drury. (2018). *International, Economic, and Human Security in a Changing World (Third Edition)*. CQ Press
- [31] Stanley, Elizabeth. (2009). *Torture, Truth and Justice: The Case of Timor Leste*. New York: Routledge.
- [32] Trembath A, and Grenfell, D. (2007). Mapping the Pursuit of Gender Equality: Non-Government and International Agency Activity in Timor-Leste. Melbourne: RMIT/Globalism Institute.
- [33] Traub, J. (2000). Inventing East Timor. *Foreign Affairs*. Vol. 79. No. 4
- [34] Tripp, Alli, Myra Ferree ankarimd Christina Ewig (Eds). 2013. *Gender, Violence and Human security, Critical Perspectives*. New York Unviversity Press.
- [35] Trindade, Sofia. Sexual Violence in Timor Leste 1975-1999. Master Thesis. Faculty of Law, International Crimes and Criminology. Vrije University, Amsterdam.

- [36] Vukoicic, Jelena. (2017). Radical Feminism as a Discourse in The Theory of Conflict. *ResearchGate*, 33-49.
- [37] Wood, Elisabeth. (2014). Conflict-Related Sexual Violence and The Policy Implications of Recent Research. *International Review of TheRed Cross*. Vol. 96, No. 894, 457-478
- [38] Wigglesworth, A. (2013). The Growth of Civil Society in Timor-Leste: Three Moments of Activism. *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 43. No. 151–74
- [39] Whittington, S. (2003). Gender and Peacekeeping: The United Nations Transitional Administration in East Timor. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 28. No. 4, 1283–1288.